

LAPORAN KINERJA



LPMP KALIMANTAN TIMUR

TAHUN 2020



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya LPMP Provinsi Kalimantan Timur dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 dengan tepat waktu. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban LPMP Provinsi Kalimantan Timur atas pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan sumber daya yang tersedia dalam menjalankan program/kegiatan yang telah dinyatakan dalam perjanjian kinerja, yang dituangkan dalam naskah Perjanjian Kinerja LPMP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020. Perjanjian Kinerja secara tersurat menyampaikan indikator kinerja yang terukur, yang menyajikan informasi kinerja dalam pencapaian sasaran strategis yang harus dipertanggungjawabkan LPMP Provinsi Kalimantan Timur kepada Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

Secara umum LPMP Provinsi Kalimantan Timur telah merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dengan Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020. Dalam Perjanjian Kinerja tersebut ditetapkan dua sasaran strategis, yakni: (1) Meningkatnya Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh jenjang pendidikan, yang terdiri atas 9 indikator kinerja; (2) Terwujudnya tata kelola LPMP Provinsi Kalimantan Timur yang baik, yang terdiri atas dua indikator kinerja.

Kami menyadari bahwa masih banyak tantangan dalam menjalankan tugas dan fungsi lembaga terkait penjaminan mutu pendidikan di daerah, diantaranya:

1. Masih rendahnya capaian SNP di sebagian Kab/Kota menunjukkan bahwa di satuan pendidikan tersebut perlu perhatian yang lebih dalam meningkatkan kinerja satuan pendidikan agar capaian SNP dapat terpenuhi;
2. Budaya mutu belum tumbuh dan berkembang secara optimal dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
3. Hasil raport mutu secara *online* tahun 2020 yang masih terkendala masalah teknis.

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dicapai LPMP Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 sebagai mata rantai pelaksanaan penjaminan mutu yang berkelanjutan. Diharapkan laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.



Samarinda, 29 Desember 2020
Kepala LPMP Provinsi Kalimantan
Timur,

Mohamad Hartono, S.H., M.Ed.
NIP 196701101994031003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ringkasan Eksekutif	vi
BAB I – PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Organisasi	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi.....	3
D. Isu Strategis	4
BAB II – PERENCANAAN KINERJA LPMP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	5
BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Capaian Kinerja Organisasi	13
B. Realisasi Anggaran	39
BAB IV – PENUTUP	43
LAMPIRAN	
- Pengukuran Kinerja Tahun 2020	
- Capaian Kinerja Sasaran (Output) Tahun 2020	
- Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2020	
- Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2020	
- Pernyataan Telah Direviu	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja LPMP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Rencana Strategis LPMP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 – 2024, yang memasuki tahun kesatu pada RPJMN-IV. Laporan kinerja LPMP Provinsi Kalimantan Timur ini memberikan informasi tingkat pencapaian 2 (dua) sasaran strategis dengan 7 (tujuh) *output*, yang terdiri atas 11 (sebelas) indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 antara Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dengan Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Timur.

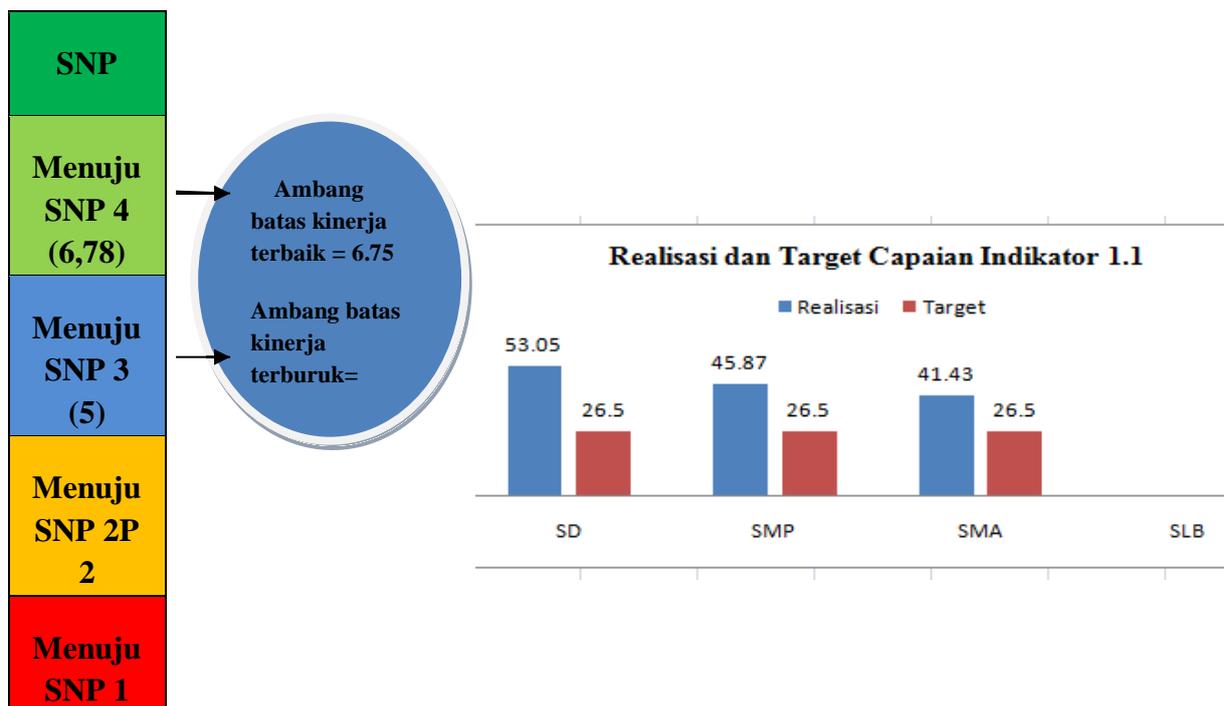
Adapun hasil capaian indikator kinerja LPMP Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 antara Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dengan Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Penjaminan Mutu Pendidikan di Seluruh Jenjang Pendidikan

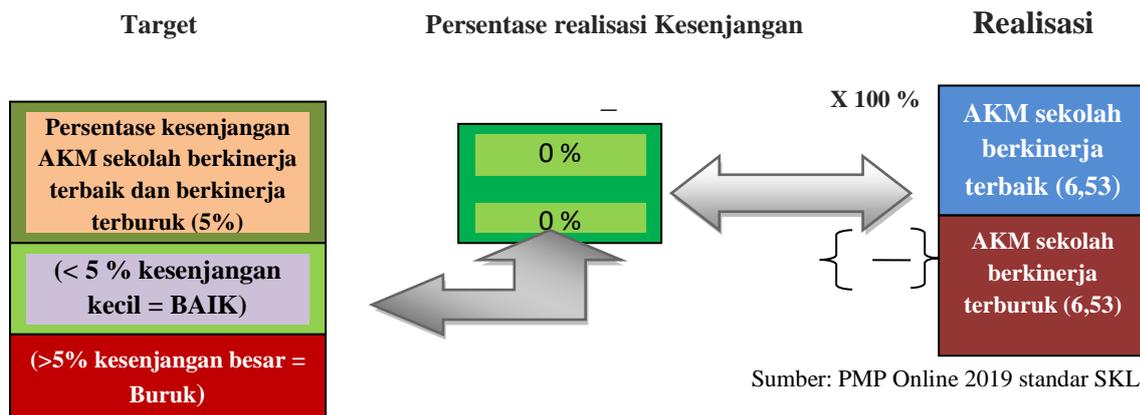
1.1. Indikator kinerja persentase satuan pendidikan jenjang SD, SMP, SMA, SLB yang memiliki kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75.

Capaian Indikator Kinerja LPMP Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Data *PMP online 2019 dan data akreditasi sekolah 2019*

Rata – Rata SNP SD, SMP, SMA

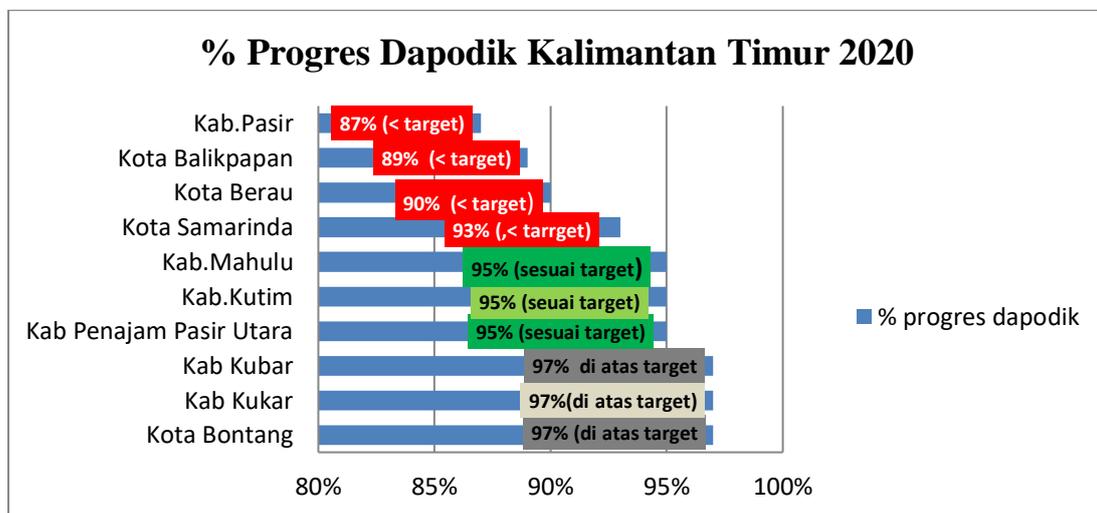


1.2. Indikator Kinerja Persentase kesenjangan hasil AKM dan survei karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk.



Pada saat seluruh proses dilakukan dengan baik dan benar akan menunjukkan hasil yang konsisten.

1.3 Indikator kinerja persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru, dan berkelanjutan.



Sumber : Aplikasi Online DAPODIK 2020 per tanggal 15 Desember 2020

Tabel Rata – Rata Capaian Indikator Kinerja 1.3 sebagai berikut :

Realisasi 2019	Tahun 2020			Capaian sampai tahun 2020
	Target	Realisasi	% Capaian	
99,44 %	95 %	93,90%	93,90%	93,90%

Dalam mencapai ketiga indikator kinerja di atas, banyak hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam merealisasikan target indikator kinerja, antara lain: Aplikasi PMP online 2020 belum terintegrasi dengan capaian akreditasi, capaian SPMI untuk seluruh satuan pendidikan dan belum menampilkan hasil rapot mutu tahun 2020. Hal tersebut mengakibatkan data capaian hasil mutu pendidikan untuk seluruh satuan pendidikan tahun 2020 di provinsi Kalimantan Timur belum dapat diperoleh. Sedangkan Assesment Kompetensi Minimal (AKM) belum ada datanya, karena AKM merupakan program baru tahun 2020 – 2024 yang baru tahap sosialisasi dan akan dilaksanakan di bulan Maret tahun 2021. Dalam menjawab indikator kinerja persentase kesenjangan hasil AKM dan survei karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk, LPMP Provinsi Kalimantan Timur masih menggunakan data rapot mutu dengan berfokus pada standar kompetensi lulusan tahun 2019.

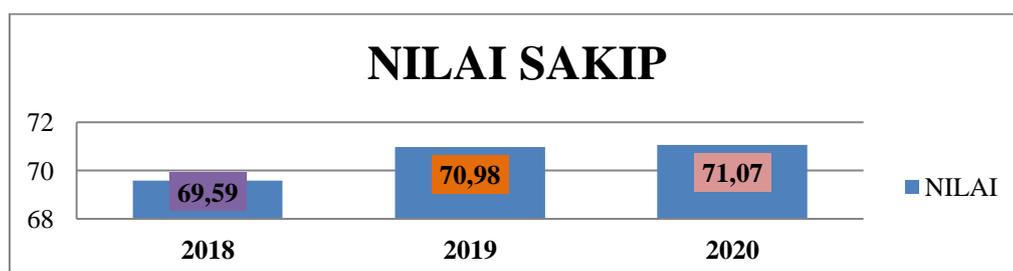
Dalam mengukur indikator kinerja yang terdapat pada perjanjian kinerja LPMP Provinsi Kalimantan Timur ini tidak terlepas dari mata rantai pelaksanaan penjaminan mutu di satuan pendidikan yang menjadi tolak ukur kinerja satuan pendidikan atas keterlaksanaan penjaminan mutu di satuan pendidikan yang dilaksanakan secara terus menerus, konsisten dan berkelanjutan.

Langkah-langkah antisipasi yang dilakukan dalam menangani hambatan dan permasalahan di atas adalah:

1. Koordinasi dengan satgas PMP PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tentang perlunya pengintegrasian dan pengembangan sistem informasi dalam satu sistem yang meliputi PMP, akreditasi sekolah, DAPODIK dan lain lain yang berkaitan dengan kinerja satuan pendidikan.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PMP di satuan pendidikan sebagai bahan masukan bagi LPMP dan Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

2. Terwujudnya tata kelola LPMP Provinsi Kalimantan Timur yang baik, dicapai dari indikator kinerja sebagai berikut:

2.1. Indikator kinerja Predikat SAKIP LPMP Provinsi Kalimantan Timur



2.2. Indikator kinerja Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL

Tabel. Perbandingan realisasi nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL tahun 2019 dan 2020

Tahun	Target Nilai Kinerja (Renstra)	Nilai EKA	Nilai IKPA	Total Nilai Kinerja	Ket
1	2	3	4	5	6
2019	80		98.5	99.44	Sangat Baik
2020	81	98.46	96.71	97,76	Sangat Baik

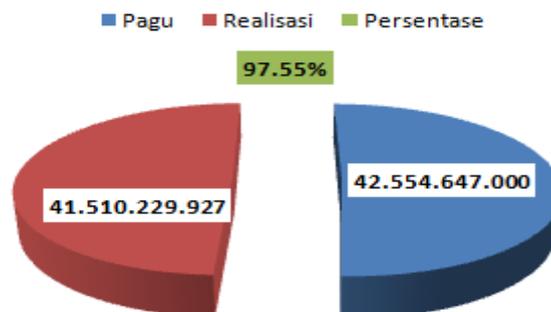
Pada tahun 2019, 2020 LPMP Provinsi Kalimantan Timur telah meraih penghargaan dalam hal pelaksanaan kinerja anggaran.



Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL LPMP Provinsi Kalimantan Timur perlu proses penjaminan mutu internal yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kinerja lembaga.

Kedua sasaran strategis di atas dicapai melalui dukungan anggaran yang memadai, dengan serapan anggaran tahun 2020 sebesar 97.55% setara dengan Rp41.510.229.927 dari pagu anggaran Rp42.554.647.000. Pengukuran evaluasi proses pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan yang terintegrasi dengan aplikasi online simproka yang dikembangkan oleh biro PKLN Kemendikbud diperoleh nilai 96.71 atau termasuk kategori “Sangat Baik”.

Capaian Realisasi Anggaran LPMP Provinsi Kalimantan Timur Per Tanggal 31 Desember 2020



Hambatan dalam capaian kinerja input/penyerapan anggaran disebabkan karena adanya wabah pandemi covid 19, reorganisasi kemendikbud, dan sering terjadi revisi penyesuaian

pagu anggaran serta terbatasnya sumber daya manusia (SDM) LPMP Provinsi Kalimantan Timur. Langkah antisipasi untuk menanggulangi kendala yang terjadi adalah melaksanakan kegiatan secara daring, koordinasi dan meningkatkan komunikasi secara intens dengan pusat, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi anggaran serta mengubah bentuk pola kegiatan, yang awalnya kegiatan dilakukan dengan tatap muka disesuaikan menjadi daring.

Melalui laporan kinerja LPMP Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja dan masukan terhadap pelaksanaan kegiatan untuk meminimalisir resiko terhadap pencapaian tujuan sasaran startegis LPMP Provinsi Kalimantan Timur di tahun selanjutnya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum



Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimantan Timur merupakan satu dari 34 LPMP yang ada di setiap provinsi di Indonesia. Dalam perjalanannya mengalami perubahan bentuk dan nama yang berpengaruh pula pada tugas dan fungsinya. Pada awalnya LPMP merupakan Balai Penataran Guru (BPG) yang didirikan pada tahun 1991 melalui SK Mendikbud Nomor 0240a/O/1991 tanggal 2 Mei 1991, dengan

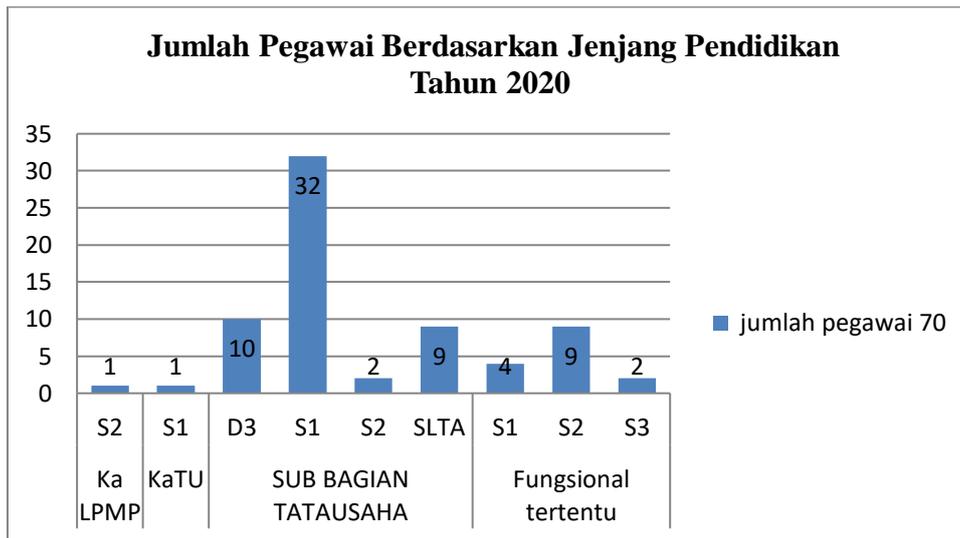
tugas dan fungsi sebagai Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Guru di provinsi bertanggung jawab langsung pada Direktorat Tenaga Kependidikan yang berada di bawah lingkup Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional. Kementerian Pendidikan Nasional memunculkan peraturan dan kebijakan untuk merefungsionalisasi dan merestrukturisasi BPG menjadi Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) yang tertuang pada SK Mendiknas Nomor 087/O/2003 tanggal 4 Juli 2003, yang selanjutnya rincian tugas LPMP diatur dalam SK Mendiknas Nomor 044/O/2004, tanggal 14 Mei 2004. LPMP mempunyai tugas sebagai penjamin mutu pendidikan dasar dan menengah di provinsi sesuai dengan kebijakan nasional. Sesuai Permendiknas Nomor 31 Tahun 2005 disebutkan bahwa LPMP berada di bawah Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK).

Tanggal 13 Februari 2007, dengan berdasarkan pada Kepmendiknas Nomor 7 Tahun 2007, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan difungsionalisasi menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan dengan maksud untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Tahun 2010 LPMP berada di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (Badan PSDMP dan PMP). Berdasarkan pada Permendikbud Nomor 14 Tahun 2015 dalam Pasal 1 disebutkan bahwa LPMP adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Adapun jumlah SDM berdasarkan tingkat pendidikannya sebagai berikut:

Grafik 1.1 Sumber Daya Manusia LPMP Provinsi Kalimantan Timur



1.2 Landasan Hukum

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Permenpan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga;
4. Permendikbud Nomor 9 Tahun 2016 tentang SAKIP di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020 tentang struktur organisasi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.

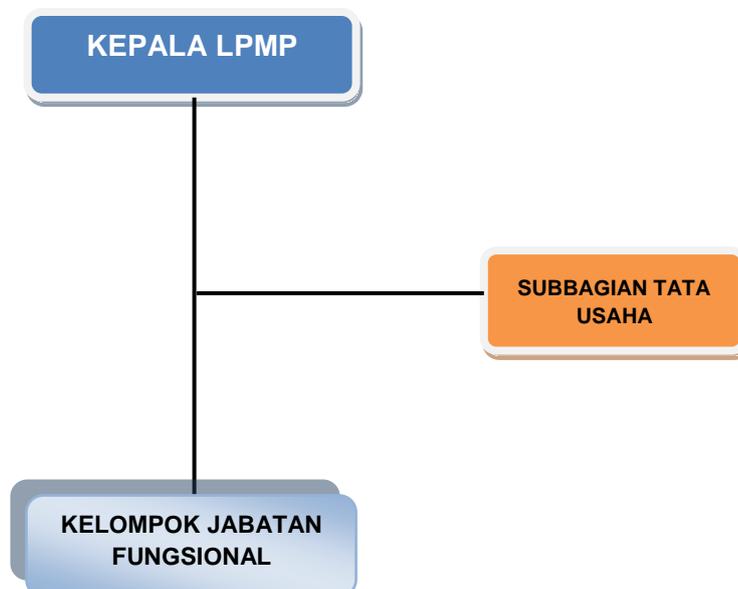
1.3 Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi



Berdasarkan Permendikbud Nomor 26 Tahun 2015 Tahun 2020, struktur organisasi LPMP adalah sebagai berikut:

- a) Kepala;
- b) Subbagian Tata Usaha;
- c) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan 1.1 Struktur Organisasi LPMP Provinsi Kalimantan Timur (Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020)



1.4 Isu Strategis/Permasalahan

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, permasalahan utama/tantangan yang dihadapi LPMP Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan fungsi strategisnya dalam hal peningkatan penjaminan mutu pendidikan berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Hasil pemetaan mutu pendidikan belum dimanfaatkan secara optimal untuk penentuan kebijakan, penyusunan program, dan alokasi anggaran pendidikan oleh pemerintah daerah;
2. Pelaksanaan siklus SPMI pada masing –masing satuan pendidikan belum optimal, dimana satuan pendidikan belum memahami sepenuhnya bahwa pelaksanaan SPMI adalah langkah proses untuk menghasilkan kinerja yang baik dalam memberikan layanan pendidikan terhadap anak didik;
3. Budaya mutu belum tumbuh dan berkembang secara optimal dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Belum semua satuan pendidikan dapat memahami dan menerapkan SPMI secara mandiri, sebagai bagian dari budaya mutu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA LPMP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Tugas:

- **Penjaminan mutu**
- **Pengembangan model dan kemitraan**

Fungsi:

- Pemetaan mutu
- **Supervisi**
- **Fasilitasi**
- **Pengembangan model**
- Kemitraan
- Pengelolaan sistem informasi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi LPMP Provinsi Kalimantan Timur dan selaras dengan sasaran program dari Direktorat Jenderal Paud, Dikdas dan Dikmen maka LPMP Provinsi Kalimantan Timur merumuskan tujuan strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja satuan pendidikan jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah berdasarkan 8 SNP
2. Terwujudnya tata kelola LPMP Provinsi Kalimantan Timur yang berkualitas.

Sedangkan tugas pokok dan fungsi Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan menengah sebagai berikut :

Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen (1/2)

Permendikbud 45 Tahun 2019, Revisi Permendikbud No. 9 Tahun 2020

Tugas: (Pasal 79)

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang **pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.**

Fungsi: (Pasal 80)

1.	PERUMUSAN KEBIJAKAN peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan khusus, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan kesetaraan;
2.	PERUMUSAN STANDAR peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan khusus, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan kesetaraan;
3.	PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan khusus, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan kesetaraan;
4.	PENYUSUNAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan khusus, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan kesetaraan;

12

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah memiliki 4 (empat) tujuan strategis, yaitu:

1. Perluasan akses Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif.
2. Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah yang berkualitas dan merata
3. Penguatan mutu dan relevansi Pendidikan Dasar dan Menengah yang berpusat pada daya saing dan berkarakter
4. Penguatan sistem tata kelola Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Sebagai upaya untuk mendukung keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka disusun cascading renstra Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah dan LPMP berdasarkan tugas pokok dan fungsi LPMP Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini dilakukan untuk memastikan keselarasan renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan renstra Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah dengan LPMP Provinsi Kalimantan Timur. Adapun cascading renstra tersebut sebagai berikut :

Tabel.2.1. Cascading Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ,Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah dan LPMP

	Kemendikbud	Ditjen Dikdasmen	LPMP
Sasaran Strategis (1)	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan diseluruh jenjang		
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi literasi memenuhi nilai kompetensi minimum		
Sasaran Program		Meningkatnya kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah	
Indikator Kinerja Program		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi literasi memenuhi nilai kompetensi minimum	
Sasaran Kegiatan			Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang
Indikator Kinerja Kegiatan			Persentase kesenjangan hasil AKM dan survei karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dengan sekolah dengan kinerja terburuk
Output			Fasilitasi dan Supervisi

	Kemendikbud	Ditjen Dikdasmen	LPMP
Sasaran Strategis (1)	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan diseluruh jenjang		
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi numerasi memenuhi nilai kompetensi minimum		
Sasaran Program		Meningkatnya kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah	
Indikator Kinerja Program		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi numerasi memenuhi nilai kompetensi minimum	
Sasaran Kegiatan			Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang
Indikator Kinerja Kegiatan			Persentase kesenjangan hasil AKM dan survei karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dengan sekolah dengan kinerja terburuk
Output			Fasilitasi dan Supervisi

	Kemendikbud	Ditjen Dikdasmen	LPMP
Sasaran Strategis (1)	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan diseluruh jenjang		
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi literasi memenuhi nilai kompetensi minimum		
Sasaran Program		Meningkatnya mutu satuan pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah	
Indikator Kinerja Program		Persentase satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SLB dengan nilai scorecard minimum 75 (kategori tinggi)	
Sasaran Kegiatan			Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang
Indikator Kinerja Kegiatan			Persentase satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SLB dengan nilai (index mutu/scorecard) minimum 75 (kategori tinggi)
Output			Pemetaan mutu

	Kemendikbud	Ditjen Dikdasmen	LPMP
Sasaran Strategis (1)	Meningkatnya tatakelola yang partisipatif, transparan dan akuntabel		
Indikator Kinerja Sasaran Strategis			
Sasaran Program		Terwujudnya pengelolaan pendidikan yang partisipatif, transparan dan akuntabel pada jenjang paud, dikdas, dikmen	
Indikator Kinerja Program		Persentase dapodikdasdikmen akurat, terbaru dan berkelanjutan	
Sasaran Kegiatan			Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang
Indikator Kinerja Kegiatan			Persentase kab/kota yang memiliki dapodikdasmen akurat, terbaru dan berkelanjutan
Output			Verifikasi

Berdasarkan cascading tersebut di atas, maka diperoleh keterkaitan tujuan strategis dan indikator kinerja program Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah dan LPMP Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

Tabel 2.2 Keterkaitan Tujuan Strategis dan Indikator Kinerja Program Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah dan LPMP Provinsi Kalimantan Timur

Ditjen Paud, Dikdas, dan Dikmen*			LPMP Provinsi Kalimantan Timur		
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
1.1	Terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas	IKP 1.1.1 Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud IKP 1.1.3 Kategori capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA Kemendikbud	6	Terwujudnya tata kelola LPMP yang baik	IKK 6.3 Rata-rata Predikat Sakip Satker minimal Predikat A IKK 6.5 Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL masing-masing Satker minimal 85
3.2	Meningkatnya Mutu satuan pendidikan jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah	IKP 3.2.1 Persentase Satuan Pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB dengan nilai scorecard minimum 75 (kategori tinggi)	8	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	IKK 8.1 Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki indeks capaian Siswa minimal 75 30,1% IKK 8.2 Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk 5%
					IKK 8.3 Persentase kab/kota yang data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan 95,8 %

**Tabel 2.3 Pentahapan Pencapaian Renstra LPMP Provinsi Kalimantan Timur
2020 – 2024**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	1. Persentase satuan pendidikan (jenjang SD,SMP,SMA dan SLB yang memiliki indeks capaian siswa minimal 75	26,5 %	27,4%	28,3%	29,2%	30,1
		2. Persentase kesenjangan hasil AKM dan survey karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	5 %	5%	5%	5%	5%
		3. Persentase Kab/kota yang data pokok pendidikan dasar akurat, terbarukan dan berkelanjutan	95 %	95,2%	95,4%	95,6 %	95,8 %
2	Terwujudnya tata kelola lpmp yang baik	1. Predikat SAKIP LPMP Provinsi Kalimantan Timur	A	A	A	A	A
		2. Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL	97	97,5	98	98,5	99

Dalam mencapai tujuan strategis, yang tertuang dalam RENSTRA LPMP Provinsi Kalimantan Timur 2020 – 2024, maka LPMP Provinsi Kalimantan Timur menetapkan target tahunan yang akan dicapai melalui Perjanjian Kinerja tahun 2020. Berikut ringkasan Perjanjian Kinerja LPMP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020.

Tabel 2.5 Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja LPMP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020



2012021152437

Halaman 1 dari 2

TARGET KINERJA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
1	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	1.1 Persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (score card) minimal 75	%	26,50
		1.2 Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	%	5,00
		1.3 Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan	%	95,00

2.	Terwujudnya Tata Kelola LPMP yang baik	2.1. Predikat SAKIP LPMP Kalimantan Timur	A
		2.2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL	97

KEGIATAN DAN ANGGARAN

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	5630	Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Seluruh Jenjang Pendidikan	42.554.647.000
TOTAL			42.554.647.000

Jakarta, November 2020

. Direktur Jenderal PAUD dan DIKDASMEN

(Jumeri, S.T.P., M.Si.)

Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
Pendidikan Provinsi Kalimantan
Timur

(Mohamad Hartono, S.H., M.Ed.)

Total jumlah anggaran kegiatan peningkatan layanan pengembangan penjaminan mutu pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan SD, SMP, SMA dan SLB adalah Rp 42.554.647.000 (Empat Puluh Dua Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

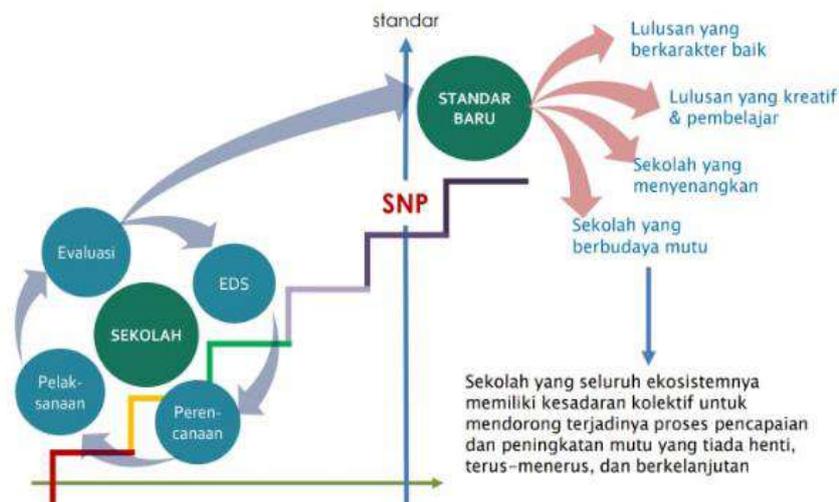
Sesuai perjanjian kinerja tahun 2020, LPMP Provinsi Kalimantan Timur menetapkan dua sasaran strategis dengan 11 indikator kinerja. Upaya LPMP Provinsi Kalimantan Timur meningkatkan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah sesuai dengan tugas dan fungsinya dilakukan melalui kegiatan : pemetaan mutu satuan pendidikan, supervisi mutu pendidikan, monitoring dan evaluasi hasil pemetaan mutu pendidikan, dan fasilitasi satuan pendidikan sesuai delapan Standar Nasional Pendidikan dengan metode: pembinaan, penguatan, pembimbingan, dan pendampingan terhadap SDM pemerintah daerah dalam implementasi SPMI dan SPME. Oleh karena itu untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan suatu unit kerja, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas yang diamanatkan maka setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja perlu diketahui tingkat ketercapaiannya. Adapun perealisasiannya dari masing-masing sasaran strategis yang tercantum dalam dokumen perjanjian kinerja sebagai berikut:

Sasaran strategis meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan

Ketercapaian sasaran strategis “*meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan*” didukung melalui ketercapaian 11 indikator kinerja, yaitu:

1. Persentase Satuan pendidikan jenjang SD yang memiliki kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75;
2. Persentase Satuan pendidikan jenjang SMP yang memiliki kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75;
3. Persentase Satuan pendidikan jenjang SMA yang memiliki kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75;
4. Persentase Satuan pendidikan jenjang SLB yang memiliki kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75;
5. Persentase kesenjangan hasil AKM dan survei karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk pada satuan pendidikan jenjang SD;
6. Persentase kesenjangan hasil AKM dan survei karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk pada satuan pendidikan jenjang SMP;
7. Persentase kesenjangan hasil AKM dan survei karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk pada satuan pendidikan jenjang SMA;
8. Persentase kesenjangan hasil AKM dan survei karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk pada satuan pendidikan SLB
9. Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan;

10. Predikat SAKIP LPMP Provinsi Kalimantan Timur
11. Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL



Gambar3.1 Makna SPMI

Adapun hasil capaian indikator kinerja LPMP Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Timur dengan Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2020 sebagai berikut :

1. Persentase Satuan pendidikan jenjang SD yang memiliki kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75

Dalam menentukan persentase satuan pendidikan jenjang SD yang memiliki kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75, menggunakan pendekatan nilai rapot mutu sekolah dari aplikasi PMP tahun 2019 ditetapkan ambang batas kinerja terburuk 6,13 dan ambang batas kinerja terbaik 6,75.

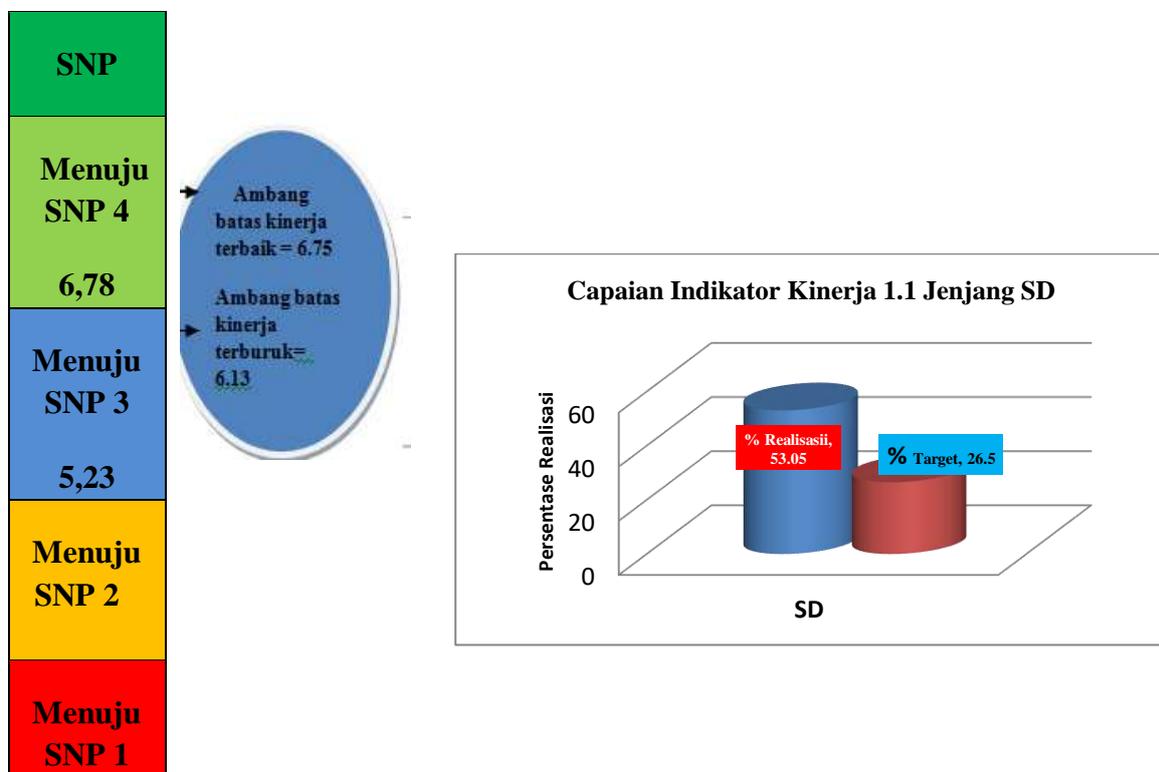


Jadi jika berdasar pada capaian rata –rata SNP tahun 2019, untuk jenjang SD berdasarkan kriteria tersebut di atas, maka satuan pendidikan jenjang SD yang memiliki kinerja sekolah

(indeks mutu) minimal 75 adalah dari 2535 sekolah terdapat 1.190 sekolah yang memiliki kinerja terburuk dengan capaian rata-rata SNP adalah 5.23. Sedangkan sekolah yang memiliki kinerja terbaik terdapat 1345 sekolah dengan capaian rata – rata SNP 6,78. Jadi persentase jumlah SD yang berkinerja baik adalah 53,05% . Persentase ini berada di atas target 26.5 % . Hal ini menunjukkan bahwa satuan pendidikan SD sebagian besar telah menunjukkan kinerja yang baik, namun juga masih terdapat 46,94 % yang masih berkinerja buruk. Hal ini di sebabkan karena sekolah tersebut masih belum memahami penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan internal yang ada di sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah berdasarkan 8 SNP dan masih belum optimalnya aplikasi PMP di sekolah menyebabkan masih banyak sekolah yang belum terkirim data mutunya.

Adapun grafik hasil capaian indikator kinerja LPMP Provinsi Kalimantan Timur, persentase satuan pendidikan jenjang SD yang memiliki kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75 sebagai berikut:

Rata – rata capaian SNP SD



Pada saat proses SPMI dilakukan dengan baik dan benar maka akan menunjukkan hasil yang konsisten.

Berikut grafik tren potret mutu satuan pendidikan berdasarkan hasil capaian SNP tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 untuk seluruh jenjang SD yang diperoleh dari aplikasi PMP online sebagai berikut :

Capaian Mutu 2020

2020



2019



2018



2017



2016



Deskripsi	Kategori	Batas Bawah	Batas Atas
★★★★★	SNP	6,67	7
★★★★	Menuju SNP 4 (M4)	5,07	6,66
★★★	Menuju SNP 3 (M3)	3,71	5,06
★★	Menuju SNP 2 (M2)	2,05	3,70
★	Menuju SNP 1 (M1)	0	2,04

Jumlah Rapor Mutu

Berdasarkan rapor mutu sekolah yang terdapat dalam aplikasi PMP online dari tahun 2016 – 2019, hasil capaian SNP meningkat, menunjukkan bahwa mutu sekolah dasar semakin baik dari tahun ke tahun. Rapor mutu ini harus terus dievaluasi untuk mengetahui potret mutu satuan pendidikan agar rapor mutu yang dihasilkan sesuai dengan kondisi riil di sekolah.

2. Persentase Satuan pendidikan jenjang SMP yang memiliki kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75

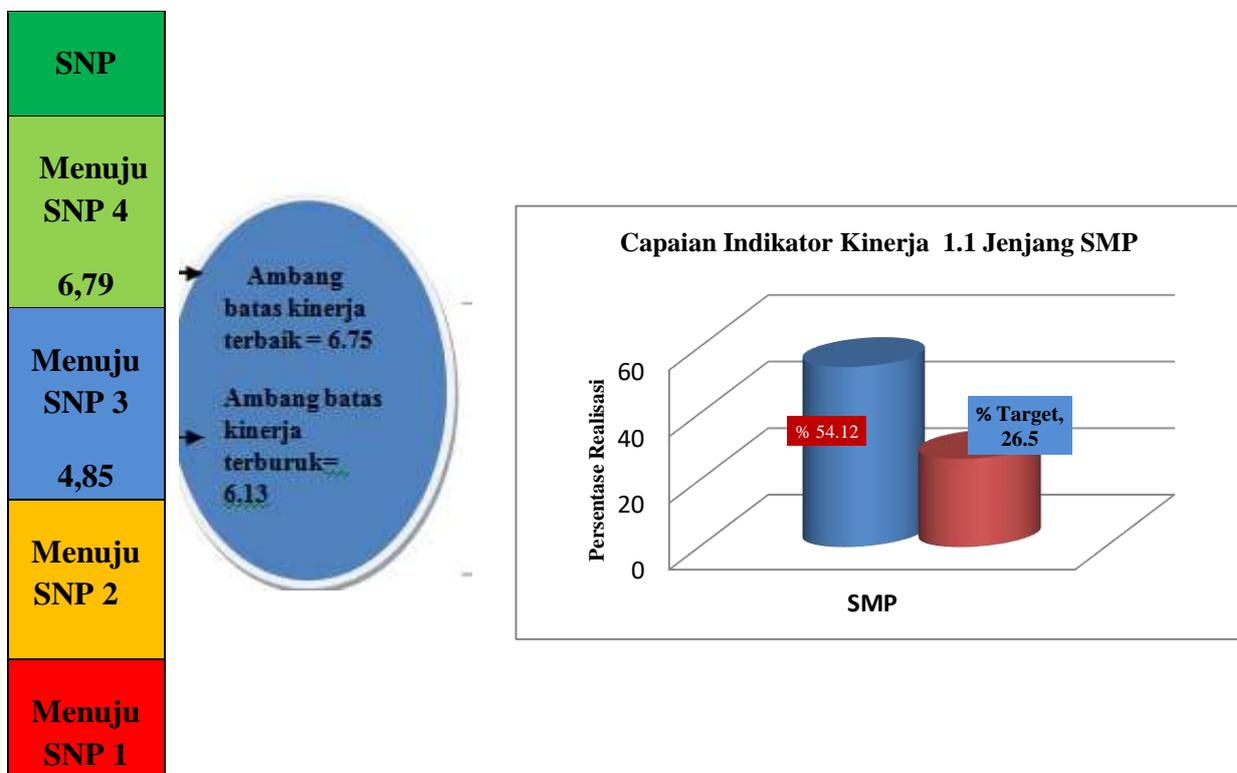
Dalam menentukan persentase satuan pendidikan jenjang SD yang memiliki kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75, menggunakan pendekatan nilai rapor mutu sekolah dari aplikasi PMP tahun 2019 ditetapkan ambang batas kinerja terburuk 6.,13 dan ambang batas kinerja terbaik 6,75.



Jadi jika berdasar pada capaian rata –rata SNP tahun 2019, untuk jenjang SD berdasarkan kriteria tersebut di atas, maka satuan pendidikan jenjang SMP yang memiliki kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75 adalah dari 922 sekolah terdapat 499 sekolah yang memiliki kinerja terburuk dengan capaian rata-rata SNP adalah 4.85. Sedangkan sekolah yang memiliki kinerja terbaik terdapat 423 sekolah dengan capaian rata – rata SNP 6,79. Jadi persentase jumlah SD yang berkinerja baik adalah 45.87% . Persentase ini berada di atas target 26.5 % . Hal ini menunjukkan bahwa satuan pendidikan SMP sebagian besar telah menunjukkan kinerja yang baik, namun juga masih terdapat 54,12 % yang masih berkinerja buruk. Untuk jenjang SMP ini, persentase jumlah sekolah yang berkinerja buruk lebih besar dari persentase jumlah sekolah yang berkinerja baik. Hal ini di sebabkan karena sekolah tersebut masih belum memahami penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan internal yang ada di sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah berdasarkan 8 SNP dan masih belum optimalnya aplikasi PMP di sekolah menyebabkan masih banyak sekolah yang belum terkirim data mutunya.

. Adapun grafik capaian SNP, hasil akreditasi dan hasil SPMI sebagai berikut :

Rata – rata capaian SNP SMP



Pada saat proses SPMI dilakukan dengan baik dan benar maka akan menunjukkan hasil yang konsisten

Adapun grafik tren hasil capaian SNP tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 dan 2020 untuk seluruh jenjang SMP yang diperoleh dari aplikasi PMP online sebagai berikut :

SMP

Capaian Mutu

2020



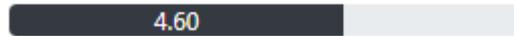
2019



2018



2017



2016



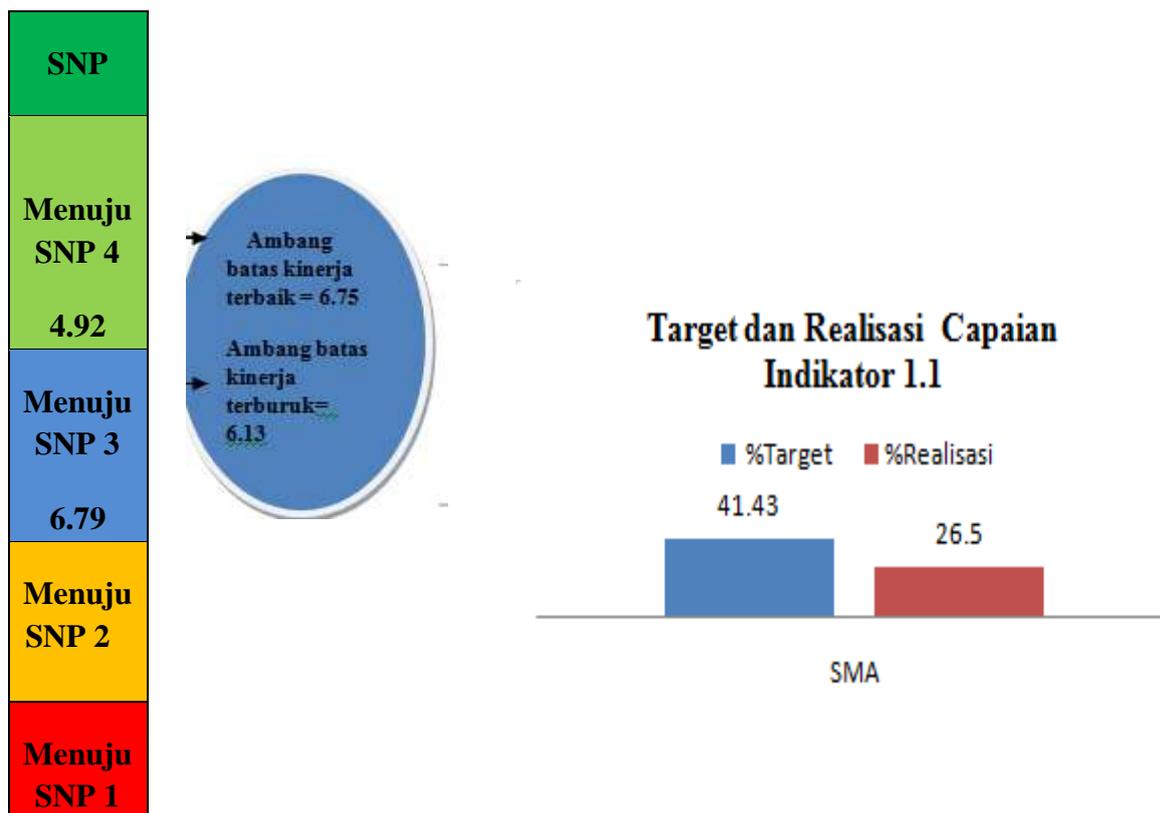
Kategori	Batas Bawah	Batas Atas
SNP	6,67	7
Menuju SNP 4 (M4)	5,07	6,66
Menuju SNP 3 (M3)	3,71	5,06
Menuju SNP 2 (M2)	2,05	3,70
Menuju SNP 1 (M1)	0	2,04

3. Persentase Satuan pendidikan jenjang SMA yang memiliki kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75



Dalam menentukan persentase satuan pendidikan jenjang SMA yang memiliki kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75, menggunakan pendekatan nilai rapot mutu sekolah dari aplikasi PMP tahun 2019 ditetapkan ambang batas kinerja terburuk 6,13 dan ambang batas kinerja terbaik 6,75.

Rata rata capaian SNP SMA



Jadi jika berdasar pada capaian rata –rata SNP tahun 2019, untuk jenjang SMA berdasarkan kriteria tersebut di atas, maka satuan pendidikan jenjang SMA yang memiliki kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75 adalah dari 292 sekolah terdapat 171 sekolah yang memiliki kinerja terburuk dengan capaian rata-rata SNP adalah 4.92. Sedangkan sekolah yang memiliki kinerja terbaik terdapat 121 sekolah dengan capaian rata – rata SNP 6,79. Jadi persentase jumlah SMA yang berkinerja baik adalah 41,43% . Persentase ini berada di atas target 26.5 % . Hal ini menunjukkan bahwa satuan pendidikan SMA telah menunjukkan kinerja yang baik, namun juga masih terdapat 58,56% yang masih berkinerja buruk. Untuk jenjang SMA ini, persentase jumlah sekolah yang berkinerja buruk lebih besar dari persentase jumlah sekolah yang berkinerja baik. Hal ini di sebabkan karena sekolah tersebut masih belum memahami penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan internal yang ada di sekolah dalam usaha peningkatan mutu pendidikan di sekolah berdasarkan 8 SNP dan masih belum optimalnya aplikasi PMP di sekolah menyebabkan masih banyak sekolah yang belum terkirim data mutunya.

Pada saat seluruh proses dilakukan dengan baik dan benar seharusnya akan menunjukkan hasil yang konsisten.

Adapun grafik tren hasil capaian SNP tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019,2020 untuk seluruh jenjang SMA yang diperoleh dari aplikasi PMP online sebagai berikut :

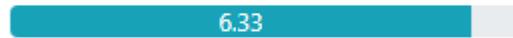
SMA

Capaian Mutu

2020



2019



2018



2017



2016



Kategori	Batas Bawah	Batas Atas
SNP	6,67	7
Menuju SNP 4 (M4)	5,07	6,66
Menuju SNP 3 (M3)	3,71	5,06
Menuju SNP 2 (M2)	2,05	3,70
Menuju SNP 1 (M1)	0	2,04

4. Persentase Satuan pendidikan jenjang SLB yang memiliki kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75



. Untuk indikator ini belum dapat dihitung, karena merupakan program terbaru dari LPMP, selama terjadi perubahan reorganisasi kemendikbud tahun 2020 selama periode renstra 2020 – 2024.

- Hambatan dan Kendala
 - a. Pada tahun 2020 ini hambatan dan permasalahan yang ditemukan dalam realisasi output untuk mengukur indikator kinerja persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA dan SLB) yang memiliki kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75 adalah dengan adanya wabah pandemi yang bersifat global mengakibatkan terjadinya berbagai perubahan baik dari segi anggaran maupun dari segi mekanisme pelaksanaan kegiatan.
 - b. Adanya reorganisasi Kemendikbud, mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tertunda dan semua dalam masa transisi baik dalam perubahan struktur organisasi, pergantian pejabat eselon, yang tentunya juga butuh waktu untuk membahas ulang renstra 2020 - 2024 dalam melakukan penyesuaian dengan adanya perubahan organisasi Kemendikbud, serta kegiatan yang pelaksanaannya di selenggarakan oleh pusat juga tertunda dan sangat mempengaruhi kegiatan lainnya.
 - c. Hasil rapot mutu sekolah untuk tahun 2020 ini, belum dapat diakses sementara yang dapat diakses adalah rapot mutu sekolah 2019.
 - d. Dalam mengukur kinerja sekolah nilai yang diperhitungkan adalah nilai capaian SNP, nilai SPMI, nilai AKM dan nilai AKREDITASI sekolah, namun nilai akreditasi adalah tidak bersifat tahunan melainkan bersifat 1 kali dalam empat tahun dan nilai akreditasi seluruh sekolah belum sepenuhnya dapat diakses .
 - e. Hasil SPMI sekolah baik tahun 2019 maupun tahun 2020 , belum dapat diakses datanya

- Langkah Antisipasi

Langkah-langkah antisipasi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dan permasalahan di atas adalah:

 - a. Melaksanakan kegiatan dengan secara daring, dan melakukan revisi anggaran agar semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik;
 - b. Berkoordinasi dengan pusat, mengenai pelaksanaan kegiatan dan melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran secara daring;
 - c. Koordinasi dan menjalin hubungan komunikasi secara intens dengan pihak satgas pusat, agar aplikasi rapot mutu dapat diakses untuk mengetahui potret mutu pendidikan tahun 2020.
 - d. Menggunakan data nilai SPMI, capaian SNP, nilai AKM dan nilai akreditasi di tahun yang sama dengan perjanjian kinerja LPMP Provinsi Kalimantan Timur, jika proses dilaksanakan dengan baik maka akan mendapatkan hasil yang konsisten.
 - e. Berkomunikasi dengan satgas pusat tentang perlunya pengembangan sistem informasi yang saling terintegrasi antara aplikasi PMP online dengan pelaksanaan SPMI di seluruh sekolah agar dapat diperoleh data yang akurat

5. Persentase Kesenjangan Hasil AKM dan survei karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk pada satuan pendidikan jenjang SD

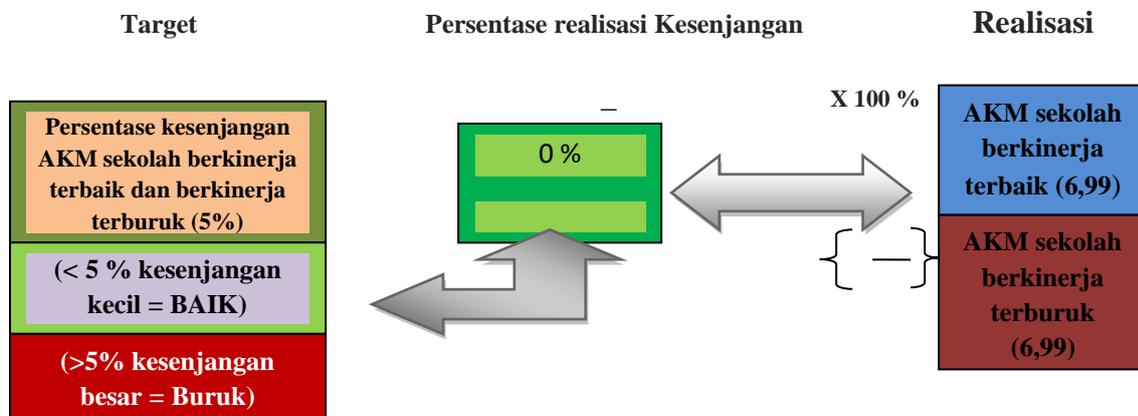
Pada indikator kinerja persentase kesenjangan hasil AKM dan survei karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk pada satuan pendidikan SD, sumber data yang diperoleh dengan mengakses capaian raport mutu tahun 2019/ 2020 pada standar kompetensi lulusan karena, pada standar SKL terdapat indikator karakter dan AKM ini adalah program terbaru dari pemerintah. Assesment Kompetensi Minimal ini disosialisasikan di bulan Desember 2020 yang mana pelaksanaannya secara nasional di mulai pada bulan Maret 2021. Hasil Assesment Kompetensi Minimal ini adalah sebagai pengganti dari ujian nasional yang bertujuan untuk memetakan mutu pendidikan di Indonesia agar pemerintah dapat mengambil kebijakan dan menyusun program pendidikan berdasarkan rekomendasi dari hasil AKM yang telah dipetakan. Persentase kesenjangan hasil AKM dan survei karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk pada satuan pendidikan jenjang SD diiperoleh dengan cara menghitung persentase rata – rata hasil standar kompetensi lulusan dari sekolah yang berkinerja baik dengan hasil rata – rata standar kompetensi lulusan dari sekolah yang berkinerja buruk pada tahun 2019. Sumber data pada indikator ini juga tidak terlepas dari data hasil akreditasi sekolah tahun 2019, karena pengembangan akhlak mulia/ budi pekerti bersifat intensif dan terpadu dan masuk sebagai salah satu fokus akreditasi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) mewajibkan akreditasi bagi seluruh sekolah dan madrasah sebagai bagian dari keseluruhan upaya penjaminan mutu Pendidikan. Karena itu, proses evaluasi terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada upaya untuk menjamin terselenggaranya layanan pendidikan bermutu dan memberdayakan sekolah sehingga dapat menghasilkan lulusan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Adapun rumus yang digunakan dalam menghitung persentase kesenjangan hasil AKM dan survei karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk pada satuan pendidikan jenjang SD sebagai berikut :

$$\% \text{ Kesenjangan} = \frac{\text{Rata – rata hasil SKL , pada sekolah yang berkinerja baik} - \text{Rata – rata hasil SKL, pada sekolah yang berkinerja buruk}}{\text{Rata – rata hasil SKL, pada sekolah yang berkinerja baik}} \times 100 \%$$

Berdasarkan rumus di atas maka diperoleh persentase kesenjangan hasil AKM dan survei karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk pada satuan jenjang SD adalah 0 %, dimana hasil rata –rata standar kompetensi lulusan pada sekolah yang berkinerja baik memiliki nilai SKL = 6,99. sedangkan nilai SKL pada sekolah yang berkinerja buruk juga memiliki nilai = 6,99. Hasil ini lebih kecil dari target yang ada dalam PK 2020 menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan antara sekolah yang berkinerja baik dan sekolah yang berkinerja buruk jika dilihat dari segi standar kompetensi lulusan sekolah dan hal

menunjukkan bahwa pendidikan karakter merupakan basic utama dalam pendidikan. Hasil ini belum dapat dibandingkan tahun sebelumnya karena pada tahun 2020 ini adalah tahun pertama dari pelaksanaan renstra 2020 – 2024, dan pengukuran indikator kinerja ini dimulai pada tahun 2020.

Adapun grafik Persentase kesenjangan hasil AKM antara sekolah kinerja terbaik dan sekolah kinerja terburuk jenjang SD sebagai berikut :



Gambar : Pengukuran AKM tingkat SD

6. Persentase kesenjangan hasil AKM dan survei karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk pada satuan pendidikan jenjang SMP

Pada indikator kinerja persentase kesenjangan hasil AKM dan survei karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk pada satuan pendidikan SMP, sumber data yang diperoleh dengan mengakses capaian raport mutu tahun 2019/ 2020 pada standar kompetensi lulusan karena, pada standar SKL terdapat indikator karakter dan AKM ini adalah program terbaru dari pemerintah. Assesment Kompetensi Minimal ini disosialisasikan di bulan Desember 2020 yang mana pelaksanaannya secara nasional di mulai pada bulan Maret 2021. Hasil Assesment Kompetensi Minimal ini adalah sebagai pengganti dari ujian nasional

yang bertujuan untuk memetakan mutu pendidikan di Indonesia agar pemerintah dapat mengambil kebijakan dan menyusun program pendidikan berdasarkan rekomendasi dari hasil AKM yang telah dipetakan. Persentase kesenjangan hasil AKM dan survei karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk pada satuan pendidikan jenjang SMP diperoleh dengan cara menghitung persentase rata – rata hasil standar kompetensi lulusan dari sekolah yang berkinerja baik dengan hasil rata – rata standar kompetensi lulusan dari sekolah yang berkinerja buruk pada tahun 2019. Sumber data pada indikator ini juga tidak terlepas dari data hasil akreditasi sekolah tahun 2019, karena pengembangan akhlak mulia/ budi pekerti bersifat intensif dan terpadu dan masuk sebagai salah satu fokus akreditasi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) mewajibkan akreditasi bagi seluruh sekolah dan madrasah sebagai bagian dari keseluruhan upaya penjaminan mutu Pendidikan. Karena itu, proses evaluasi terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada upaya untuk menjamin terselenggaranya layanan pendidikan bermutu dan memberdayakan sekolah sehingga dapat menghasilkan lulusan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Adapun rumus yang digunakan dalam menghitung persentase kesenjangan hasil AKM dan survei karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk pada satuan pendidikan jenjang SMP sebagai berikut :

$$\% \text{ Kesenjangan} = \frac{\text{Rata – rata hasil SKL , pada sekolah yang berkinerja baik} - \text{Rata – rata hasil SKL, pada sekolah yang berkinerja buruk}}{\text{Rata – rata hasil SKL, pada sekolah yang berkinerja baik}} \times 100 \%$$

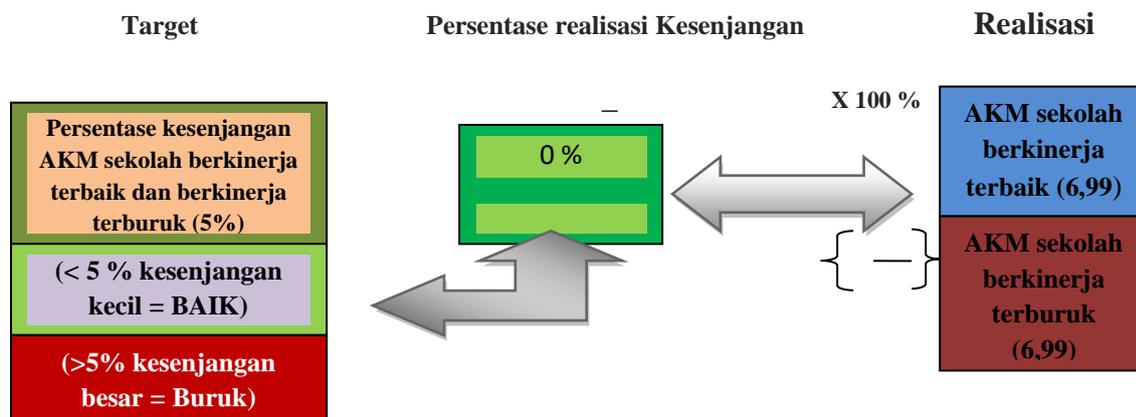
Berdasarkan rumus di atas maka diperoleh persentase kesenjangan hasil AKM dan survei karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk pada satuan jenjang SMP adalah 0 %, dimana hasil rata –rata standar kompetensi lulusan pada sekolah yang berkinerja baik memiliki nilai SKL = 6,99. sedangkan nilai SKL pada sekolah yang berkinerja buruk juga memiliki nilai = 6,99. Hasil ini lebih kecil dari target yang ada dalam PK 2020 menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan antara sekolah yang berkinerja baik dan sekolah yang berkinerja buruk jika dilihat dari segi standar kompetensi lulusan sekolah dan hal menunjukkan bahwa pendidikan karakter merupakan basic utama dalam pendidikan.

Hasil ini belum dapat dibandingkan tahun sebelumnya karena pada tahun 2020 ini adalah tahun pertama dari pelaksanaan renstra 2020 – 2024, dan pengukuran indikator kinerja ini dimulai pada tahun 2020.



Gambar : Pengukuran AKM tingkat SMP

Adapun grafik Persentase kesenjangan hasil AKM antara sekolah kinerja terbaik dan sekolah kinerja terburuk jenjang SMP sebagai berikut :



7. Persentase kesenjangan hasil AKM dan survei karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk pada satuan pendidikan jenjang SMA

Pada indikator kinerja persentase kesenjangan hasil AKM dan survei karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk pada satuan pendidikan SMA, sumber data yang diperoleh dengan mengakses capaian raport mutu tahun 2019/ 2020 pada standar kompetensi lulusan karena, pada standar SKL terdapat indikator karakter dan AKM ini adalah program terbaru dari pemerintah. Assesment Kompetensi Minimal ini disosialisasikan di bulan Desember 2020 yang mana pelaksanaannya secara nasional di mulai pada bulan Maret 2021. Hasil Assesment Kompetensi Minimal ini adalah sebagai pengganti dari ujian nasional yang bertujuan untuk memetakan mutu pendidikan di Indonesia agar pemerintah dapat mengambil kebijakan dan menyusun program pendidikan berdasarkan rekomendasi dari hasil AKM yang telah dipetakan. Persentase kesenjangan hasil AKM dan survei karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk pada satuan pendidikan jenjang SMA diperoleh dengan cara menghitung persentase rata – rata hasil standar kompetensi lulusan dari sekolah yang berkinerja baik dengan hasil rata – rata standar kompetensi lulusan dari sekolah yang berkinerja buruk pada tahun 2019. Sumber data pada indikator ini juga tidak terlepas dari data hasil akreditasi sekolah tahun 2019, karena pengembangan akhlak mulia/ budi pekerti bersifat intensif dan terpadu dan masuk sebagai salah satu fokus akreditasi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) mewajibkan akreditasi bagi seluruh sekolah dan madrasah sebagai bagian dari keseluruhan upaya penjaminan mutu Pendidikan. Karena itu, proses evaluasi terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada upaya untuk menjamin terselenggaranya layanan pendidikan bermutu dan memberdayakan sekolah sehingga dapat menghasilkan lulusan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Adapun rumus

yang digunakan dalam menghitung persentase kesenjangan hasil AKM dan survei karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk pada satuan pendidikan jenjang SMA sebagai berikut :

$$\% \text{ Kesenjangan} = \frac{\text{Rata – rata hasil SKL , pada sekolah yang berkinerja baik} - \text{Rata – rata hasil SKL, pada sekolah yang berkinerja buruk}}{\text{Rata – rata hasil SKL, pada sekolah yang berkinerja baik}} \times 100 \%$$

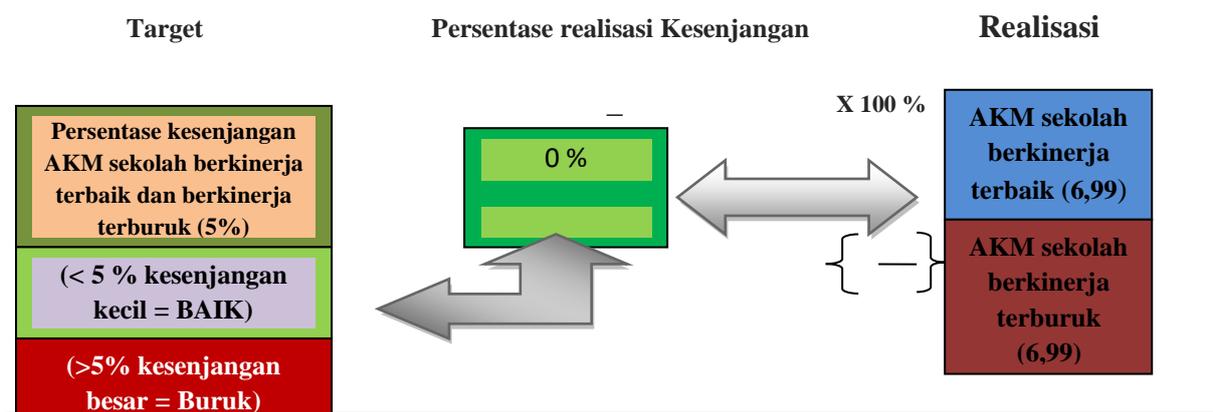
Berdasarkan rumus di atas maka diperoleh persentase kesenjangan hasil AKM dan survei karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk pada satuan jenjang SMA adalah 0 %, dimana hasil rata –rata standar kompetensi lulusan pada sekolah yang berkinerja baik memiliki nilai SKL = 6,99. sedangkan nilai SKL pada sekolah yang berkinerja buruk juga memiliki nilai = 6,99. Hasil ini lebih kecil dari target yang ada dalam PK 2020 menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan antara sekolah yang berkinerja baik dan sekolah yang berkinerja buruk jika dilihat dari segi standar kompetensi lulusan sekolah dan hal menunjukkan bahwa pendidikan karakter merupakan basic utama dalam pendidikan.

Hasil ini belum dapat dibandingkan tahun sebelumnya karena pada tahun 2020 ini adalah tahun pertama dari pelaksanaan renstra 2020 – 2024, dan pengukuran indikator kinerja ini dimulai pada tahun 2020.



endumuman Kelulusan SMA/SMK Tahun 2020 Online. Foto: Antara Foto

Adapun grafik Persentase kesenjangan hasil AKM antara sekolah kinerja terbaik dan sekolah kinerja terburuk jenjang SMA sebagai berikut :



8. Persentase kesenjangan AKM dan survei karakter antara sekolah yang berkinerja terbaik dan berkinerja terburuk pada satuan pendidikan jenjang SLB



Siswa kelas 6 SDLB penyandang disabilitas tunanetra mengerjakan

Gambar.Siswa penyandang disabilitas tunanetra mengikuti ujian

- Hambatan dan Kendala
 - a. Pada tahun 2020 ini hambatan dan permasalahan yang ditemukan dalam realisasi output untuk mengukur indikator kinerja persentase kesenjangan AKM dan survei karakter antara sekolah yang berkinerja terbaik dan berkinerja terburuk pada satuan pendidikan adalah hasil AKM dan survei karakter ini sebagai pengganti dari ujian nasional akan dimulai pada tahun 2021, sementara dalam renstra 2020 -2024 dan pelaporan kinerja LPMP 2020 merupakan indikator kinerja yang harus dipertanggungjawabkan.
 - b. Adanya wabah pandemi yang bersifat global mengakibatkan terjadinya berbagai perubahan baik dari segi anggaran maupun dari segi mekanisme pelaksanaan kegiatan.
 - c. Adanya reorganisasi Kemendikbud, mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tertunda dan semua dalam masa transisi baik dalam perubahan struktur organisasi, pergantian pejabat eselon, yang tentunya juga butuh waktu untuk membahas ulang renstra 2020 - 2024 dalam melakukan penyesuaian dengan adanya perubahan organisasi Kemendikbud, serta kegiatan yang pelaksanaannya di selenggarakan oleh pusat juga tertunda dan sangat mempengaruhi kegiatan lainnya.
 - d. Hasil raport mutu sekolah untuk tahun 2020 ini, belum dapat diakses sementara yang dapat diakses adalah raport mutu sekolah 2019.
 - f. Belum adanya pengintegrasian hasil capaian SNP, SPMI, AKM dan akreditasi sekolah ke dalam aplikasi PMP online, yang dapat menampilkan data secara valid dan akurat untuk seluruh sekolah.

- Langkah Antisipasi

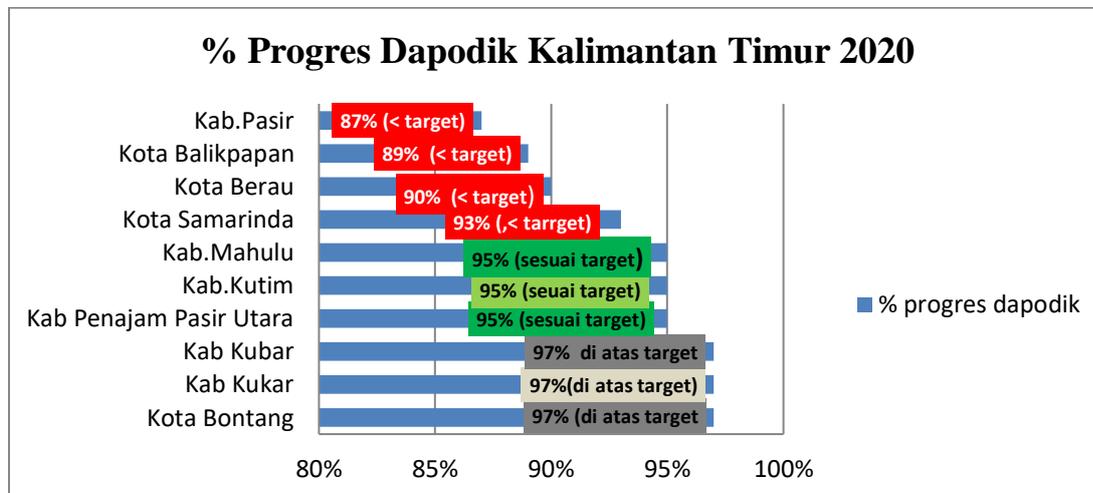
Langkah-langkah antisipasi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dan permasalahan di atas adalah:

- a. Data hasil AKM dan survei karakter diperoleh dengan mengakses hasil raport mutu sekolah tahun 2019/2020 khususnya pada standar kompetensi lulusan.
- b. Melaksanakan kegiatan dengan secara daring, dan melakukan revisi anggaran agar semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik;
- c. Melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran secara daring secara internal maupun eksternal dengan pusat;
 - a. Menggunakan data raport mutu tahun 2019 dan berkoordinasi serta menjalin hubungan komunikasi secara intens dengan pihak satgas pusat, agar aplikasi raport mutu dapat diakses untuk mengetahui potret mutu pendidikan tahun 2020.
 - b. Menggunakan data akreditasi sekolah tahun 2019 dan berkoordinasi serta menjalin hubungan komunikasi secara intens dengan pihak satgas pusat, tentang pentingnya jaringan sistem informasi yang terintegrasi antara hasil capaian SNP, SPMI AKM dan akreditasi sekolah dengan aplikasi PMP agar diperoleh data yang valid, akurat dan terbaru.

9. Persentase Kabupaten/kota yang memiliki data pokok pendidikan Dasar dan Menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan

Untuk menjawab indikator kinerja persentase kabupaten/kota yang memiliki data pokok pendidikan Dasar dan Menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan sumber datanya mengarah pada aplikasi online data pokok pendidikan (Dapodik) yang dikembangkan oleh Kemdiknas. Data pokok pendidikan (dapodik) adalah system pendataan skala nasional yang terpadu dan merupakan sumber data utama pendidikan nasional yang merupakan bagian dari program perencanaan pendidikan nasional dalam mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Karena tanpa perencanaan pendidikan yang matang maka seluruh program yang terbentuk dan perencanaan tersebut akan jauh dari tujuan yang diharapkan. Untuk melaksanakan perencanaan pendidikan maupun untuk melaksanakan program-program pendidikan secara tepat sasaran dibutuhkan data yang cepat, lengkap, valid, akurat dan terus up to date. Dengan ketersediaan data yang cepat, lengkap, valid, akurat dan terus up to date tersebut maka proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja program-program pendidikan nasional dapat dilaksanakan dengan lebih terukur, tepat sasaran, efektif, efisien dan berkelanjutan. Adapun persentase kabupaten/kota yang memiliki data pokok pendidikan Dasar dan Menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan yang diperoleh aplikasi online Dapodik 2020 sebagai berikut :

Data pokok pendidikan (Dapodik) ini dapat dibandingkan persentasenya ditahun 2019, karena indikator ini juga tercantum dalam periode renstra 2015 – 2019. Adapun data persentase kabupaten/kota yang memiliki data pokok pendidikan Dasar dan Menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan di 10 kab/kota propinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 sebagai berikut :



Sumber : Aplikasi DAPODIK 2020 per tanggal 15 Desember 2020

Berdasarkan data di atas, kab/kota yang memiliki persentase data pokok pendidikan Dasar dan Menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan yang berada di atas target 95 % dari perjanjian kinerja tahun 2020 adalah Kota Bontang, Kab. Kukar, Kab. Kubar dengan persentase 97 %. Sedangkan kab/kota yang mencapai 95 % progress dapodiknya adalah Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Kutim dan Kab. Mahakam Ulu. Kab/kota yang berada dibawah target adalah Kota Samarinda dengan progress dapodik 93%, kota Berau 90% dan kota Balikpapan 89% serta Kab Pasir 87 %.

Data perbandingan tahun sebelumnya mengenai data pokok pendidikan Dasar dan Menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan dari 10 kab/kota di Propinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan diperoleh rata – rata persentase sebagai berikut :

Realisasi 2019	Tahun 2020			Capaian sampai tahun 2020
	Target	Realisasi	% Capaian	
99,44 %	95 %	93,90%	93,90%	93,90%

Berdasarkan data di atas, Persentase data pokok pendidikan Dasar dan Menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan pada tahun 2020 di propinsi Kalimantan Timur ini diperoleh persentase rata –rata 93,90 % per tanggal 15 Desember 2020 dari 10 kab/kota. Tahun 2019 diperoleh rata – rata 99,44%. Persentase pada tahun ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya karena hasilnya masih belum finish di pengujung tahun 2020. Adapun hambatan

dan kendala serta langkah antisipasi yang dilakukan dalam melaksanakan indikator kinerja persentase kabupaten/kota yang memiliki data pokok pendidikan Dasar dan Menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan pada tahun 2020 sebagai berikut :

- Hambatan dan Kendala
 - a. Pada tahun 2020 ini hambatan dan permasalahan yang ditemukan dalam realisasi output untuk mengukur indikator kinerja persentase kabupaten/kota yang memiliki data pokok pendidikan Dasar dan Menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan adalah masih ada sekolah dan pengawas sekolah yang sudah tidak beroperasi dan sudah digantikan oleh pengawas yang baru tetapi belum terdaftar dan belum bisa masuk dalam sistem aplikasi dapodik.
 - b. Adanya wabah pandemi yang bersifat global mengakibatkan terjadinya berbagai perubahan baik dari segi anggaran maupun dari segi mekanisme pelaksanaan kegiatan.
 - c. Adanya reorganisasi Kemendikbud, mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tertunda dan semua dalam masa transisi baik dalam perubahan struktur organisasi, pergantian pejabat eselon, yang tentunya juga butuh waktu untuk membahas ulang renstra 2020 - 2024 dalam melakukan penyesuaian dengan adanya perubahan organisasi Kemendikbud, serta kegiatan yang pelaksanaannya di selenggarakan oleh pusat juga tertunda dan sangat mempengaruhi kegiatan lainnya.
 - g. Hasil rapot mutu sekolah untuk tahun 2020 ini, belum dapat diakses sementara yang dapat diakses adalah rapot mutu sekolah 2019.
- Langkah Antisipasi

Langkah-langkah antisipasi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dan permasalahan di atas adalah:

 - a. Melakukan sinkronisasi data dan verval terhadap sekolah yang sudah tidak beroperasi dan sinkronisasi data terhadap pengawas sekolah yang sudah pensiun dengan pengawas sekolah yang baru.
 - b. Melaksanakan kegiatan dengan secara daring, dan melakukan revisi anggaran agar semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik;
 - c. Berkoordinasi dengan PUSAT, mengenai pelaksanaan kegiatan dan melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran secara daring;
 - c. Koordinasi dan menjalin hubungan komunikasi secara intens dengan pihak satgas pusat, agar aplikasi rapot mutu dapat diakses untuk mengetahui potret mutu pendidikan tahun 2020.

Sasaran Strategis Terwujudnya Tata Kelola LPMP yang Baik

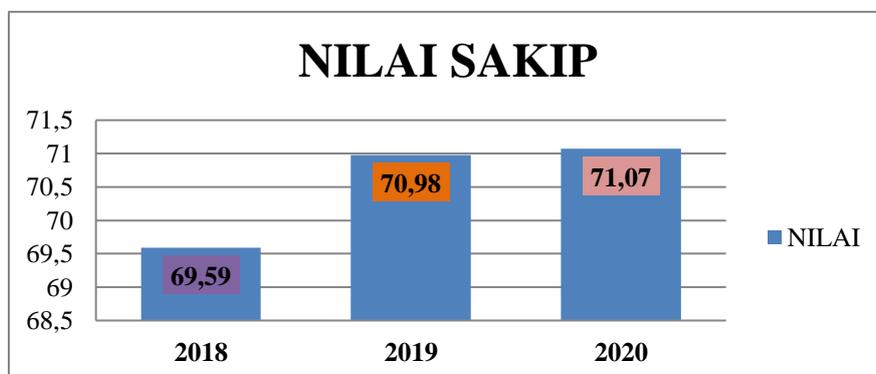
Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis “*Terwujudnya Tata Kelola LPMP Provinsi Kalimantan Timur yang Baik*”, didalam prosesnya juga tidak terlepas dari 11 indikator kinerja yang tercantum dalam perjanjian kinerja LPMP Provinsi Kalimantan Timur. Dimana

terdapat 9 indikator kinerja pada sasaran strategis “*Meningkatnya Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh jenjang pendidikan*” dan 2 indikator kinerja pada sasaran strategis “*terwujudnya tata kelola LPMP Provinsi Kalimantan Timur*”. Hal ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan dan mendukung ketercapaian visi dan misi Kemendikbud pada umumnya dan LPMP Provinsi Kalimantan Timur pada khususnya. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut tentunya diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yakni: pemerintahan yang efektif, efisien,transparansi, akuntabel, serta adanya peningkatan layanan publik. Pada sasaran strategis “*Terwujudnya tatakelola LPMP Provinsi Kalimantan Timur yang baik*” indikator yang diukur adalah:

10. Nilai SAKIP LPMP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

Pengukuran indikator kinerja ini dapat dilihat dari nilai SAKIP LPMP Provinsi Kalimantan Timur. SAKIP ini diperlukan untuk meningkatkan efektifitas penggunaan anggaran yang beroorientasi pada hasil. Oleh karena itu SAKIP ini perlu dievaluasi setiap tahun atas pelaksanaan program untuk meningkatkan efektifitas pembangunan. Adapun nilai SAKIP LPMP Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

Tabel 3.36 Indikator Kinerja Terlaksananya Pelayanan di Bidang Pendidikan



Nilai SAKIP LPMP Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2018 – 2019 mengalami kenaikan, meski belum terealisasi sesuai dengan target yang ada pada perjanjian kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa LPMP Provinsi Kalimantan Timur sudah meningkatkan efektifitas penggunaan anggaran yang borientasi hasil.

Untuk mencapai nilai minimal SAKIP sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja 2019 LPMP Provinsi Kalimantan Timur, maka perlu melaksanakan proses penjaminan mutu internal di lingkungan LPMP Provinsi Kalimantan Timur. Yang di dalamnya mencakup proses perencanaan, pelaksanaan evaluasi, pengendalian dan peningkatan kinerja lembaga.

11. Nilai Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKAKL

Tabel. Perbandingan realisasi nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL tahun 2019 dan 2020

Tahun	Target Nilai Kinerja (Renstra)	Nilai EKA	Nilai IKPA	Total Nilai Kinerja	Ket
1	2	3	4	5	6
2019	80		98.5	99.44	Sangat Baik
2020	81	98.46	96.71	97,76	Sangat Baik

Dalam melaksanakan program tahunan LPMP Provinsi Kalimantan Timur, maka dalam proses pelaksanaannya perlu juga dievaluasi baik mengenai IKPA (Kinerja proses anggaran) dan EKA (Evaluasi kinerja akhir yang berorientasi hasil). Pada tahun 2019, dan tahun 2020 LPMP Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan penghargaan nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL 2019 baik dalam kinerja proses (IKPA) dan kinerja akhir (EKA). Adapun jenis penghargaan yang telah diraih dalam hal pelaksanaan kinerja anggaran sebagai berikut:



LPMP Provinsi Kalimantan Timur, akan senantiasa berusaha untuk mejalankan setiap program sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam reformasi birokrasi, yakni reformasi yang berkaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), anggaran berbasis kinerja, organisasi (Kelembagaan) berbasis kinerja, dan sistem sumber daya aparatur yang berorientasi pada kinerja sebagai prioritas utama. Pada tahun 2019, dan tahun 2020 LPMP Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan penghargaan nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL 2020 dalam kinerja proses pelaksanaan anggaran (IKPA) dan penghargaan pengelolaan belanja modal terbesar.

Ketercapaian ke-11 indikator kinerja yang terdapat dalam perjanjian kinerja LPMP Provinsi Kalimantan Timur 2020 dikarenakan adanya dukungan oleh beberapa program/kegiatan yang telah dipetakan sesuai dengan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Indikator kinerja **Persentase Satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA dan SLB) yang memiliki kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75**, didukung oleh output dan kegiatan sebagai berikut :
 5630. 001. Satuan Pendidikan Yang Telah Dipetakan Mutu Pendidikannya;
 - a. Analisis Data Mutu;
 - b. Penyusunan Rekomendasi Peningkatan Mutu;
 - c. Deseminasi Pemetaan Mutu;

 5630. 003. Satuan Pendidikan Yang Difasilitasi berdasarkan 8 SNP
 - a. Sosialisasi Penjaminan Mutu Pendidikan;
 - b. Sosialisasi SPMI;
 - c. Bimbingan Teknis SPMI;
 - d. Pendampingan Sekolah yang difasilitasi oleh LPMP melalui daring;
 - e. Penyusunan program kerja SPME pemerintah melalui daring;
 - h. Deseminasi Hasil melalui daring;
 - i. Monitoring kebijakan kemendikbud melalui daring;
 - j. Sosialisasi SPMPDM kepada pemerintah daerah melalui daring;
2. Indikator kinerja **Persentase kesenjangan AKM dan survei karakter antara sekolah yang berkinerja terbaik dan berkinerja terburuk** didukung oleh output dan kegiatan sebagai berikut :
 - 5630.002. Satuan Pendidikan Yang Disupervisi dalam Pencapaian SNP;
 - a. Penyusunan program supervisi PMP;
 - b. Bimtek Supervisi;
 - c. Supervisi Satuan Pendidikan;
 - d. Analisis Supervisi Mutu Pendidikan;
 - e. Deseminasi dan Evaluasi hasil supervisi;
3. Indikator kinerja **Persentase Kabupaten/kota yang memiliki data pokok pendidikan Dasar dan Menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan** didukung oleh output dan kegiatan sebagai berikut :
 - 5630.004. Satuan Pendidikan Yang Terverifikasi Mutu Pendidikannya;
 - a. Bimtek Fasda Pengumpulan Data;
 - b. Pelaksanaan Pengumpulan Data;
 - c. Verifikasi dan validasi;
4. Indikator kinerja **Predikat SAKIP LPMP Provinsi Kalimantan Timur** dan indikator kinerja **Nilai Kinerja Anggaran** atas pelaksanaan RKAKL, didukung oleh output dan kegiatan sebagai berikut :
 - 5630.951. Layanan Sarana dan Prasarana Internal;
 - a. Pengadaan kendaraan bermotor;
 - b. Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran;
 - c. Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan;
 - 5630.970. Layanan Dukungan Manajemen Satker;
 - a. Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran;
 - b. Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;
 - c. Pengelolaan Kepegawaian;

- d. Pelayanan umum, pelayanan rumah tangga, dan perlengkapan;
- 5630.994. Layanan Perkantoran;
- a. Gaji dan Tunjangan;
 - b. Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran;

Empat indikator dari “ Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75 ” dapat disimpulkan bahwa:

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja Predikat SAKIP LPMP Provinsi Kalimantan Timur dan indikator kinerja nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL antara lain:

- a. Adanya wabah pandemi yang bersifat global mengakibatkan terjadinya berbagai perubahan baik dari segi anggaran maupun dari segi mekanisme pelaksanaan kegiatan.
- b. Adanya reorganisasi Kemendikbud, mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tertunda dan semua dalam masa transisi baik dalam perubahan struktur organisasi, pergantian pejabat eselon, yang tentunya juga butuh waktu untuk membahas ulang renstra 2020 - 2024 dalam melakukan penyesuaian dengan adanya perubahan organisasi Kemendikbud.

Langkah antisipasi yang diambil agar target indikator kinerja dapat tercapai adalah:

- a. Melaksanakan kegiatan dengan secara daring, dan melakukan revisi anggaran agar semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik;
- b. Berkoordinasi dengan pusat, mengenai pelaksanaan kegiatan dan melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran secara daring;

B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan revisi terakhir Pagu Anggaran LPMP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 yang ada dalam perjanjian kinerja adalah sebesar Rp42.554.647.000,- (empat puluh dua milyar limaratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). Perjanjian Kinerja LPMP Provinsi Kalimantan Timur 2020 mengalami 3 kali revisi karena adanya pergantian pejabat eselon 1 dan adanya perubahan anggaran sebagai akibat adanya pandemi covid 19. Pagu awal anggaran pada saat perjanjian kinerja adalah Rp44.171.093.000 (Empat puluh empat milyar seratus tujuh puluh satu juta Sembilan puluh tiga ribu rupiah). Pagu anggaran ini mengalami revisi (terjadi pemotongan anggaran) sebesar Rp1.616.446.000,- (satu milyar enam ratus enam belas juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) oleh pusat karena adanya masalah pandemi covid 19. Dari total pagu revisi terakhir yang dikelola, terdiri atas 2 kegiatan yakni: *kegiatan prioritas* dan *kegiatan penunjang*. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis 1 yakni *meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan*. Sedangkan kegiatan penunjang adalah kegiatan yang merupakan layanan dukungan manajemen dan kegiatan rutinitas

perkantoran yang menunjang pencapaian sasaran strategis 2 terwujudnya tata kelola LPMP Provinsi Kalimantan Timur yang baik.

Pagu anggaran yang diperjanjikan digunakan untuk membiayai pencapaian dua sasaran strategis dengan 11 (sebelas) indikator kinerja. Sasaran strategis *meningkatnya penjaminan mutu di seluruh jenjang pendidikan* didukung oleh 9 indikator kinerja, sedangkan sasaran strategis 2 terwujudnya tata kelola LPMP Provinsi Kalimantan Timur yang baik didukung oleh 2 indikator kinerja.

Pada tahun 2020 dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.310.172.000,- dan teralisasi sebesar Rp2.982.598.464,- dengan persentase capaian sebesar 90.10% dari total pagu untuk *output* prioritas.

Ketercapaian anggaran tersebut di atas didukung oleh 9 (sembilan) indikator kinerja, yang terdiri atas 4 *output* yaitu:

1. *Output* Satuan Pendidikan yang Terpetakan Mutu Pendidikanya dan *Output* Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP, terdiri atas 4 indikator kinerja (persentase satuan pendidikan jenjang SD,SMP,SMA dan SLB yang memiliki kinerja sekolah minimal 75). Pada tahun 2020, terealisasi sebesar Rp1.421.430.164,- dengan persentase capaian sebesar 88.26%.
2. *Output* satuan pendidikan yang disupervisi terdiri atas 4 indikator kinerja (persentase kesenjangan hasil AKM dan survei karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk). Pada tahun 2020, terealisasi sebesar Rp939.275.700,- dengan persentase capaian sebesar 90.28%.
3. *Output* satuan pendidikan yang terverifikasi mutu pendidikannya terdiri atas 1 indikator kinerja (persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat,terbarukan dan berkelanjutan. Pada tahun 2020, terealisasi sebesar Rp621.892.600,- dengan persentase capaian sebesar 94.32%.
4. Sedangkan sasaran strategis terwujudnya tatakelola LPMP Provinsi Kalimantan Timur yang baik, didukung oleh 2 indikator kinerja yaitu:Indikator Kinerja Nilai minimal SAKIP LPMP Provinsi Kalimantan Timur dan nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL.

Output ini didukung oleh indikator kinerja kegiatan yaitu *Output* layanan dukungan manajemen satker dan layanan sapsras dan rutinitas perkantoran. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp39.244.475.000,- yang terealisasi sebesar Rp38.527.631.463,-atau 98.17%.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

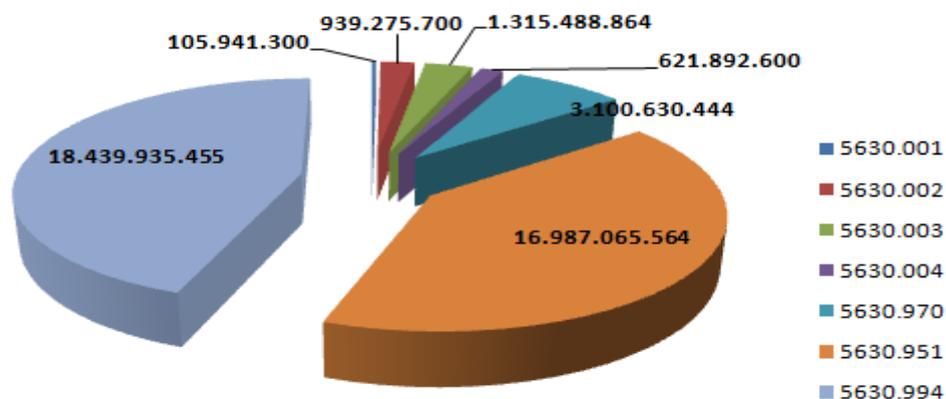
1. Efisiensi SDM

Pelaksanaan realisasi kegiatan melibatkan pegawai ASN LPMP Provinsi Kalimantan Timur dimana pelaksanaan kegiatan pada umumnya melalui sistem daring yakni zoom meeting.

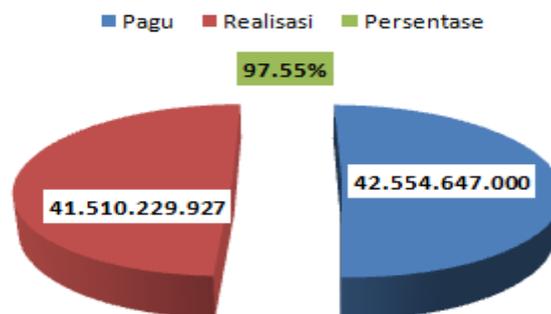
2. Efisiensi Anggaran

LPMP Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 berhasil melakukan penghematan anggaran dalam rangka optimalisasi anggaran. Dana tersebut berasal dari efisiensi belanja barang, yang meliputi perjalanan dinas dan paket *meeting*, honorarium, belanja bahan, belanja operasional, dan non operasional lainnya.

Grafik 3.47 Realisasi Anggaran Per Output 2020



Grafik 3.48 Realisasi Anggaran 2020



Capaian Hasil Evaluasi Kinerja Proses Pelaksanaan Anggaran LPMP Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 berdasarkan aplikasi online SIMPROKA tahun 2020 adalah 96.71 atau termasuk kategori **Sangat Baik**. Sehingga pada tahun 2019 dan tahun 2020 ini LPMP Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan penghargaan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai instansi yang berkinerja baik untuk seluruh kategori dalam hal penyelenggaraan kegiatan dan realisasi anggaran tahun 2019 dan 2020.

Hambatan dalam capaian kinerja *input*/penyerapan anggaran disebabkan karena terbatasnya SDM LPMP Provinsi Kalimantan Timur dan adanya wabah pandemi covid 19 serta adanya reorganisasi kemendikbud mengakibatkan pagu anggaran juga berubah ubah. Langkah antisipasi untuk menanggulangi kendala yang terjadi adalah dengan mengubah bentuk pola kegiatan, yang awalnya memerlukan SDM yang banyak menjadi kegiatan yang memerlukan SDM yang kecil dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di LPMP Provinsi Kalimantan

Timur dan mengubah metode pelaksanaan kegiatan dari luring menjadi sistem daring serta koordinasi dengan pusat mengenai evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran. Meskipun demikian, pencapaian kinerja keluaran sampai pada akhir bulan Desember ini terealisasi sesuai dengan target kinerja yang telah direncanakan dan yang terdapat dalam perjanjian kinerja LPMP Provinsi Kalimantan Timur 2020.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja LPMP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja lembaga. Hal ini dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis LPMP Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020–2024, yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program, dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh LPMP Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020.

Pengukuran Rata-rata Capaian Kinerja Keluaran (Capaian *Output*) sampai pada akhir Bulan Desember 2020 menunjukkan pencapaian sebesar 100 % termasuk kategori *sangat baik*. Sedangkan rata-rata persentase pencapaian pengukuran indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis LPMP Provinsi Kalimantan Timur “*Meningkatnya Penjaminan Mutu di Seluruh Jenjang Pendidikan*” adalah ekuivalen dengan terjadinya peningkatan rata-rata capaian SNP diseluruh jenjang pendidikan, dimana capaian SPMI, dan capaian AKM (assesmen kompetensi minimal) serta capaian kinerja sekolah menunjukkan hasil yang baik pada tahun ini. Hal ini menunjukkan bahwa apabila semua sistem terlaksana dengan baik maka akan menghasilkan hasil yang konsisten.

Realisasi penyerapan anggaran meskipun kegiatannya menumpuk pelaksanaannya di akhir tahun, disebabkan adanya wabah pandemi covid 19 tidak mempengaruhi daya serap anggaran di tahun 2020 ini. Jika dibandingkan realisasi anggaran tahun 2019 dimana LPMP Provinsi Kalimantan Timur hanya dapat merealisasikan anggaran sebesar 95,14%, sedangkan di tahun 2020 daya serap anggaran sebesar 97.55%, daya serap anggaran ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. LPMP Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun target penyerapan anggaran sampai akhir Desember 2020, namun tidak sesuai dengan target rencana realisasi. Hal ini disebabkan terbatasnya SDM LPMP Provinsi Kalimantan Timur dan adanya wabah pandemi covid 19 yang dapat merubah sistem pelaksanaan kegiatan yang awalnya direncanakan dengan secara luring berubah menjadi daring.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja LPMP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.
2. Peningkatan sistem informasi kinerja satuan pendidikan berupa capaian akreditasi sekolah, capaian SPMI, Assesment Kompetensi Minimal (AKM) dan capaian SNP yang dapat terintegrasi dengan aplikasi Penjaminan Mutu Pendidikan sehingga pemangku kepentingan dapat lebih mudah mengakses data yang akurat dan yang terbaru.

3. Pelaksanaan kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh pusat, yang berimbas pada kegiatan yang dilakukan oleh LPMP Provinsi Kalimantan Timur sebaiknya dilaksanakan pada awal tahun anggaran agar tidak berpengaruh pada capaian kinerja LPMP pada khususnya dan capaian kinerja Pendidikan Dasar dan Menengah pada umumnya. Sehingga realisasi anggaran dan kegiatan sesuai target dan tidak menumpuk di akhir tahun.
4. Hubungan komunikasi intens dengan para *stakeholder* dalam kegiatan penjaminan mutu lebih ditingkatkan, baik dengan pusat maupun daerah. Hal ini agar permasalahan yang terkait dengan PMP *online* mendapatkan solusi yang baik ditahun berikutnya.
5. Hasil *raport* mutu pendidikan secara *online* untuk seluruh jenjang pendidikan seharusnya dapat diakses sebelum disahkan anggaran APBN/APBD, karena hasil *raport* mutu tersebut digunakan dalam rangka menyusun program tahun yang akan datang. Sehingga hasil *raport* mutu pendidikan yang *up to date* dapat digunakan oleh *stakeholder* pendidikan dalam mengambil kebijakan.
6. Mengintegrasikan jenjang SLB ke dalam sistem aplikasi PMP online, agar raport mutu sekolah untuk tingkat SLB juga dapat diakses dengan cepat, terupdate dan terbaru.

LAMPIRAN

PENGUKURAN KINERJA LPMP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2020

Uraian Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	2020			Target renstra 2020	% Capaian terhadap renstra 2020
				Target	Realisasi	% Pencapaian		
1.Meningkatnya Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh jenjang Pendidikan	1.1	Persentase satuan Pendidikan (jenjang SD,SMP,SMA, dan SLB) yang memiliki kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75		2981 sekolah	2.981 sekolah	100 %	26.5 %	16,81 %
	1.2	Persentase kesenjang hasil AKM dan survey karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	-	1.490 sekolah	1.490 sekolah	100 %	5 %	0 %
	1.3	Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akura,terbarukan dan berkelanjutan	99.44%	95 %	3031 sekolah	100%	95%	93.90%
Terwujudnya tata kelola LPMP Yang baik	2.1	Predikat SAKIP LPMP Provinsi Kalimantan Timur	70.98	1 Layanan	1 Layanan	100 %	A	(BB) 71.07
	2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKAKL	99,44	1 Layanan	1 Layanan	100 %	97	94.02

Capaian Kinerja Sasaran (Output) LPMP Provinsi Kalimantan Timur 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target Kinerja 2020	Anggaran	Realisasi 2020	REALISASI 2020				Target Renstra 2020
						KINERJA OUTPUT	%	Anggaran	%	
1. Meningkatnya Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh Jenjang Pendidikan	1.1	Persentase satuan pend.(jenjang SD,SMP,SMA dan SLB) yang memiliki kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75	26.5 %	1.610.472.000	2981 sekolah	100 %	16.81	1.361.387.364 (SD,SMP,SMA, SLB)	84,53 %	26.5 %
	1.2	Persentase kesenjangan hasil AKM dan survey karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	.5%	1.040.340.000	1.490 sekolah	100 %	0 %	892.210.000	85.76 %	5%
	1.3	Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akura,terbarukan dan	95 %	659.360.000	3.031 sekolah	100 %	93..90%	618.877.600	93.86 %	95 %

		berkelanjutan								
2. Terwujudnya Tatakelola LPMP Provinsi Kalimantan Timur yang baik	2.1	Predikat SAKIP LPMP Provinsi Kalimantan Timur	A	39.244.475.000	1 Layanan	100 %	BB	38.337.754.963	97.68 %	A
	2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKAKL	97		1 layanan	100 %				
							94.02			

Perjanjian Kinerja Awal (1)



**Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)
Kalimantan Timur
dengan
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MOHAMAD HARTONO

Jabatan : Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimantan Timur
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HAMID MUHAMMAD
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juni 2020

Plt. Direktur Jenderal Pendidikan
Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah,



HAMID MUHAMMAD

Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
Pendidikan (LPMP) Kalimantan Timur,



MOHAMAD HARTONO

TARGET KINERJA

	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	<p>1.1. Persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75</p> <p>1.2. Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk</p> <p>1.3. Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan</p>	<p>26,5 %</p> <p>5,0%</p> <p>95,0%</p>
2.	Terwujudnya Tata Kelola LPMP yang baik	<p>2.1. Predikat SAKIP LPMP Kalimantan Timur</p> <p>2.2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL</p>	<p>A</p> <p>97</p>

KEGIATAN DAN ANGGARAN

No	Kegiatan/Output	Anggaran (Rp)
1.	Satuan Pendidikan yang telah dipetakan mutu pendidikannya	369.100.000
2.	Satuan Pendidikan yang telah disupervisi dalam pencapaian SNP	1.374.950.000
3.	Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP	1.895.650.000
4.	Satuan Pendidikan yang terverifikasi mutu pendidikannya	788.300.000
5.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	17.074.039.000
6.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	3.374.547.000
7.	Layanan Perkantoran	19.294.507.000
	Jumlah	44.171.093.000

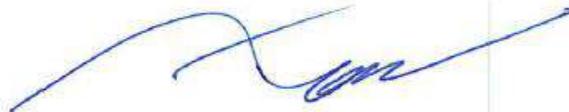
Plt. Direktur Jenderal Pendidikan
Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah,



HAMID MUHAMMAD

Jakarta, Juni 2020

Kepala Lembaga Penjaminan
Mutu Pendidikan (LPMP)
Kalimantan Timur,



MOHAMAD HARTONO

Perjanjian Kinerja Revisi (1)



Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dengan . Direktur Jenderal PAUD dan DIKDASMEN

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Hartono, S.H., M.Ed.

Jabatan : Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Jumeri, S.T.P., M.Si.

Jabatan : . Direktur Jenderal PAUD dan DIKDASMEN
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

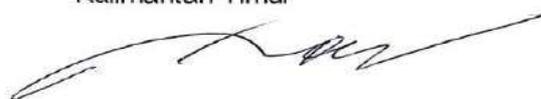
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

. Direktur Jenderal PAUD dan DIKDASMEN



Jumeri, S.T.P., M.Si.

Jakarta, Agustus 2020
Kepala Lembaga Penjaminan
Mutu Pendidikan Provinsi
Kalimantan Timur



Mohamad Hartono, S.H., M.Ed.



2009171028231

Halaman 1 dari 2

TARGET KINERJA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
1	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	1.1 Persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (score card) minimal 75	%	26,50
		1.2 Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	%	5,00
		1.3 Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan	%	95,00

KEGIATAN DAN ANGGARAN

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	5630	Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Seluruh Jenjang Pendidikan	44.171.093.000
TOTAL			44.171.093.000

. Direktur Jenderal PAUD dan DIKDASMEN

(Jumeri, S.T.P., M.Si.)

Jakarta, Agustus 2020
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
Pendidikan Provinsi Kalimantan
Timur

(Mohamad Hartono, S.H., M.Ed.)



Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi
Kalimantan Timur
dengan
. Direktur Jenderal PAUD dan DIKDASMEN

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Hartono, S.H., M.Ed.

Jabatan : Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Jumeri, S.T.P., M.Si.

Jabatan : . Direktur Jenderal PAUD dan DIKDASMEN
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

. Direktur Jenderal PAUD dan DIKDASMEN

Jumeri, S.T.P., M.Si.

Jakarta, Agustus 2020
Kepala Lembaga Penjaminan
Mutu Pendidikan Provinsi
Kalimantan Timur

Mohamad Hartono, S.H., M.Ed.



2012021152437

Halaman 1 dari 2

TARGET KINERJA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
1	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	1.1 Persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (score card) minimal 75	%	26,50
		1.2 Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	%	5,00
		1.3 Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan	%	95,00

KEGIATAN DAN ANGGARAN

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	5630	Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Seluruh Jenjang Pendidikan	42.554.647.000
TOTAL			42.554.647.000

. Direktur Jenderal PAUD dan DIKDASMEN


(Jumeri, S.T.P., M.Si.)

Jakarta, November 2020
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
Pendidikan Provinsi Kalimantan

Timur

(Mohamad Hartono, S.H., M.Ed.)

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LPMP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

Kami telah mereviu laporan kinerja LPMP Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun anggaran 2020 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggungjawab manajemen LPMP Provinsi Kalimantan Timur.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini.

Samarinda, 7 Januari 2021

Ketua TIM PEREVIU



ABD SOKIB ZUNAIDI, S.SI
NIP.196907052002121003